GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas **Tgl/Bln/Thn : 21 November 2007**

Subyek : Kehutanan **Hari : Rabu**

Halaman : 13

Jasa Kehutanan agar Mendapat Insentif

Metodologi REDD Belum Selesai Dibahas

Jakarta, Kompas - Pada Konferensi Para Pihak Ke-13 dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Bali, 3-14 Desember 2007, salah satu perjuangan Indonesia ingin menegaskan sistem pelayanan jasa kehutanan agar mendapatkan insentif global.

Sistem pelayanan ini dikemas dalam usulan skema penurunan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan (reducing emission from deforestation and degradation/REDD).

Demikian disampaikan Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup pada Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri Salman Al-Farisi, Selasa (20/11), dalam lokakarya media di Jakarta.

"Hasil konvensi di Bali nanti untuk meletakkan dasar agenda global pasca-Protokol Kyoto atau setelah tahun 2012. Skema REDD sebagai salah satu agenda setelah 2012, yang diusulkan agar disetujui," kata Salman.

Dia mengatakan, implementasi konkret REDD sendiri memang belum dirumuskan. Pembahasan rumusan implementasi diharapkan selesai dalam dua tahun, kemudian akan ditetapkan pada Konferensi Para Pihak (Conference of The Parties) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) Ke-15 di Copenhagen, Denmark.

Hal lain yang ingin diperjuangkan Indonesia meliputi kejelasan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, transfer teknologi, serta tindak lanjut program Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) yang tertuang dalam Protokol Kyoto.

"Saat ini belum ada proses transfer teknologi dalam kaitan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari negara-negara maju karena negara-negara maju itu menghendaki adanya mekanisme pasar," ujar Salman.

Metodologi belum selesai

Secara terpisah, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan Nur Masripatin mengatakan, sampai saat ini metodologi REDD usulan dari Pemerintah Indonesia masih dalam pembahasan. Berikut pula untuk penentuan proyek percontohan (pilot project) beserta kriteria-kriterianya juga belum ditetapkan.

Saat ini kajian dasar pelaksanaan REDD sedang dilakukan lembaga yang dibentuk pemerintah, Indonesian Forest Climate Alliance/IFCA. Materi kajiannya meliputi penentuan referensi emisi (baseline), strategi penurunan emisi, metode pemantauan dan verifikasi, transaksi pendanaan karbon, dan mekanisme pendistribusian pembayaran. "Itu menjadi dasar pilot project untuk 2008-2012," katanya. (NAW)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP